LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LAKIP)

KANTOR KECAMATAN BONTOSIKUYU

TAHUN ANGGARAN 2022

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

KECAMATAN BONTOSIKUYU

TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui kegiatan pembangunan di segala bidang, maka sudah sepantasnya kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa ta'ala, atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya yang tidak terhingga bagi bangsa dan negara tercinta ini.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022

Dalah wujud terciptanya pelayanan kepada masyarakat secara umum dan laporan atas pelaksanaan program kegiatanserta arah kebijakan yang telah disetujui.

Dengan segala keterbatasan, di sadari pula bahwa pelaksanaan program dan kegiatan tidak dapat terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pegawai yang telah menjalankan tugas maupun kewajibannya.

Akhir kata, kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disampaikan terima kasih, saran serta kritik yang konstruktif dan solusi sangat diharapkan untuk penyempurnaan di masa yang akan datang

Pariangan, 3 Januari 2023

CAMAT BONTOSIKUYU,

Drs. MUHAMMAD ARIS
Pangkat :Pembina Tk.I IV/b
NIP.19671029 199512 1 002

DAFTAR ISI

KataPengantar..... I
DaftarIsi..... Ii
Daftar Lampiran – Lampiran Iii
Bab I Pendahuluan 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Maksud dan Tujuan..... 2
1.3. gambaran 4
1.3.1 Lingkungan Strategis..... 4
1. Sumber Daya Aparatur..... 4
2. Sarana dan Prasarana..... 6
3. Keuangan..... 10
Bab II Perencanaan Strategis..... 14
2.1 Rencana Strategis..... 14
2.1.1 Tujuan..... 14
2.1.2 Sasaran..... 14
2.1.3 Strategi.. 15
2.2 Rencana Kinerja 16
2.2.1 Program 17
2.2.2 Kegiatan..... 18
Bab III Akuntabilitas Kinerja..... 22
3.1 Analisis Capaian Kinerja..... 22
3.2 Evaluasi Kinerja..... 23
3.3 Akuntabilitas Keuangan..... 33
Bab IV Penutup 53

DAFTAR LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. **RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 2020 KECAMATAN BONTOSIKUYU 55**
2. **INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN BONTOSIKUYU 61**

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam pelaksanaan Program kerja dan Kegiatan yang telah dilaksanakan merupakan upaya Pemerintah Kecamatan Bontosikuyu dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan serta untuk menjamin terwujudnya visi Kabupaten Kepuluan Selayar sebagai Kabupaten Kepulauan yang Maju dan Sejahtera Berbasis Keagamaan dan Kultural.

Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Bontosikuyu ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi *stakeholders* (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Bontosikuyu. Ruang lingkup penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang bersifat makro dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Kepuluan Selayar secara keseluruhan.

Pada tahun 2022, Kantor Kecamatan Bontosikuyu telah melaksanakan 6 (Program) Program, 18 (Delapan Belas) Sub Kegitan dan 11 (Seselas) kegiatan. Seluruh kegiatan tersebut tertuang dalam Rencana Kinerja Tahun 2022.

Secara keseluruhan Kantor Kecamatan Bontosikuyu tahun 2022 telah menganggarkan pembiayaan sebesar Rp.**517.300,000, -*(Lima Ratus Tujuh Belas Juta Tiga ratus Ribu rupiah)*** dengan rencana realisasi penyerapan sebesar Rp. **506.814.961** ,-atau **97,90%** dari berbagai mata anggaran yang relevan untuk membiayai input tiap kegiatan pendukung sasaran strategis.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi kinerja seluruh program dan kegiatan, Kecamatan Bontosikuyu melakukan hal-hal seperti berikut ini:

1. Menetapkan status hukum dokumen laporan, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan.
2. Mengkomunikasikan/sosialisasi akuntabilitas kinerja ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis dan rencana kerja yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi akuntabilitas kinerja ini dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renstra yang sudah dibuat.
3. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen *stakeholders* yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana strategis dan rencana kerja yang telah dibuat.
4. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat.
5. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Bontosikuyu diharapkan menjadi tolak ukur, bahan pertimbangan demi terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan Pembangunan dan pembinaan Kemasyarakatan, untuk mencapai tujuan akhir Kecamatan Bontosikuyu yaitu Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Umum Masyarakat yang Berkualitas.

Pariangan, 3 Januari 2023

CAMAT BONTOSIKUYU,

Drs. MUHAMMAD ARIS
Pangkat :Pembina Tk.I. IV/b
NIP.19671029 199512 1 002

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum LAKIP

Transparansi dan akuntanbilitas dalam hal pengelolaan keuangan sekaligus kenerja merupakan salah satu tuntutan publik pada saat ini. Maksud dan tujuan dari tuntutan ini adalah terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara bersih, bertanggungjawab dan memberikan dampak (impact) serta manfaat (benefit) dari hasil (outcome) yang diperoleh.

Dengan dasar tersebut, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) berdiri sebagai bagian dari desain besar Reformasi Birokrasi untuk melaksanakan seluruh proses kepemerintahan dalam rangka merealisasikan keinginan bersama untuk mewujudkan Good Governance. menuntut adanya sinergitas antara proses Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan sampai Evaluasi dan pemanfaatan informasi kinerja.

Evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan isu paling strategis dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah karena pada akhir prosesnya akan dapat mencerminkan optimal atau tidaknya kinerja dari tiap-tiap lembaga/ instansi pemerintah. Sebab hal ini dapat memperlihatkan sejauh mana kemajuan instansi pemerintah dalam menerapkan manajemen kinerja yang berfokus pada hasil pembangunan sistem, pengukuran, pengumpulan data kinerja dan pelaporan kinerja perkembangan proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan program serta

perkembangan pelaksanaan kemajuan tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Bontosikuyu adalah bagian dari pada perencanaan strategis dan merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan salah satu barometer untuk mengetahui sejauhmana upaya peningkatan kinerja aparatur pemerintah telah dilaksanakan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Pengukuran indikator kinerja yang dipergunakan dalam pencapaian kinerja dapat diketahui melalui indikator input (*masukan*), output (*keluaran*), outcomes (*hasil*). Sedangkan untuk mengetahui tahapan pengukuran evaluasi kinerja dapat dilihat mulai dari capaian pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan, nilai capaian kerja pelaksanaan program sampai dengan nilai capaian kebijaksanaan.

Tahapan evaluasi kinerja yang akan dijelaskan menunjukan bahwa kegiatan-kegiatan pembangunan, pengarahan, pengawasan dan pengendalian yang ada di Kecamatan Bontosikuyu berjalan baik sesuai dengan tujuan dan sasaran.

Hasil pencapaian kinerja tahun 2022 secara umum menunjukkan bahwa Kecamatan Bontosikuyu telah dapat melaksanakan visi, misi, sasaran, kebijakan dan program yang telah ditetapkan. Namun demikian masih terdapat hal-hal yang harus mendapatkan perhatian untuk peningkatkan pencapaian kinerja di tahun berikutnya.

Walaupun evaluasi kinerja sudah dilakukan dengan baik dengan pencapaian kinerja mencapai 99,90 % akan tetapi ada beberapa hambatan yang perlu diperhatikan seperti kurangnya sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.

1.2.Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan sebagai landasan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kantor Kecamatan Bontosikuyu Tahun 2022 ini adalah sebagai berikut :

1. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286;;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (sebagaimana Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
7. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan Kinerja dan tata cara Reviua atas laporan Kinerja Instansi pemerintah ;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lebaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 Nomor 3).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Bontosikuyu Tahun 2022 adalah memberikan laporan tentang penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Prima kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas yaitu kegiatan-kegiatan perencanaan strategis di wilayah Kecamatan Bontosikuyu yang dilaksanakan satu tahun sesuai yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat.

Adapun tujuan dari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Kecamatan Bontosikuyu adalah :

1. Untuk mengukur tingkat keberhasilan kinerja program dan kegiatan yang telah dilaksanakan
2. Untuk memperoleh informasi mengenai kinerja program dan kegiatan dalam satu tahun anggaran dan sebagai bukti laporan program dan hasil kegiatan kepada publik.

3. Untuk mengevaluasi kinerja dan memperbaiki serta sebagai bahan perencanaan program dankegiatan untuk tahun berikutnya;
4. Sebagai bahan umpan balik untuk perencanaan kinerja di masa datang;

1.3.1 Lingkungan Strategis

1. Sumber Daya Aparatur

Dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Bontosikuyu, sesuai dengan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Selayar, yang merupakan hasil penjabaran dari Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja. (Bagan stuktur organisasi Kecamatan pada halaman berikutnya)

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN

Perbup. No. 80 Tahun 2006

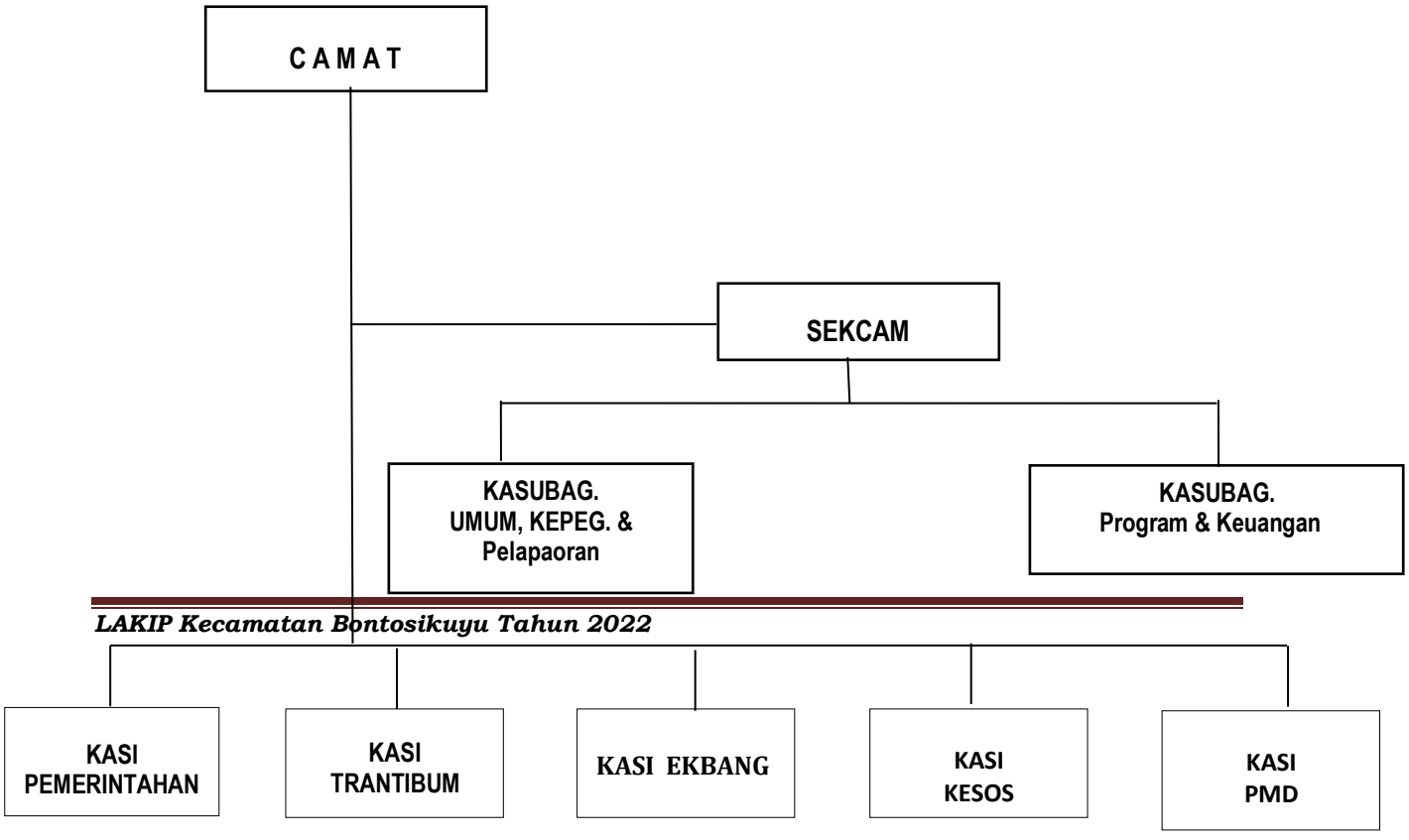

Kondisi Perangkat Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar sampai dengan akhir Desember 2022 didukung Sumber Daya Manusia sebanyak 19 orang meliputi 1 Camat (Eleson III.a), 1 orang Sekcam (Eselon III.b), 5 orang Kasi (Elselon IV.a) 2 orang Kasubag (Eselon IVb), dan 9 Orang Staf, dengan golongan / ruang kepegawaian ditambah Pegawai Harian Lepas sebanyak 23 orang. sebagaimana tertera ditabel berikut ini:

1). Keadaan Pegawai menurut Tingkat Kepangkatan

NO.	TINGKAT KEPANGKATAN	JUMLAH
1.	Pembina / Golongan IV	2
2.	Penata / Golongan III	7
3.	Pengatur / Golongan II	9
4.	Juru / Golongan I	0

2) Keadaan Pegawai menurut Tingkat Pendidikan

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	Sarjana (S.2)	0
2.	Sarjana (S.1)	5
3.	Diploma	2
4.	SLTA	6
5.	SLTP	0

3) Keadaan Pegawai menurut Jabatan Struktural/Fungsional

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	Esalon III A	1
2.	Esalon III B	1
3.	Esalon IV A	5
4.	Esalon IV B	2

2. Sarana dan Prasarana

Sedangkan Keberadaan sarana dan peralatan kerja sangat mendukung penyelengaraan tugas pokok dan fungsi organisasi. Sarana dan Peralatan Kerja Utama di Kecamatan Bontosikuyu meliputi gedung kantor dan perlengkapan lainnya antara lain :

Data Asset Kecamatan Bontosikuyu:

No.	Uraian	Keadaan			Jumlah	Keterangan
		B	RR	RB		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan				1 Unit	Rumah Jabatan
2.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah				1 Unit	Kantor Camat
3.	Lemari Besi	3	-	1	4 buah	Kantor Camat
4.	Rak Besi/Metal	-	-	✓	1 buah	Tidak Ada
5.	Brand Kas (Chubr-Leps)	-	-	✓	1 buah	Kantor Camat
6.	Lemari Kayu	3	1	2	6 buah	Kantor Camat
7.	Rak Kayu	-	5	1	6buah	Kantor Camat
8.	Meja Kayu/Rotan	9	-	4	13 buah	Kantor Camat
9.	Meja Tik	-	-	✓	1 buah	Tidak Ada
10	Kursi Putar	-	-	✓	1 buah	Kantor Camat
11	Jam Elektronik (Mirado)	-	-	✓	1 buah	Tidak Ada
12	Sepeda Motor (Honda Win)	-	-	✓	1buah	Tidak Ada

13	Mesin Ketik Manual Standar (14-16) Royal	-	-	2	2 buah	Tidak Ada
14	Sepeda Motor (Suzuki/Trs)	✓	-	-	7 buah	Kantor Camat
15	Tempat Tidur Kayu (lengkap)- Dipan	✓	-	-	1 buah	Rumah Jabatan
16	Kursi Tamu	1	-	3	4 buah	Kantor Camat
17	Meja Biro	✓	-	-	3 buah	Kantor Camat
18	Jeep (Daihatsu/ Ferosa)	✓	-	-	1 unit	Kantor Camat
19	Papan Nama Instansi	✓	-	-	1 buah	Kantor Camat
20	Meja Makan	✓	-	-	1 buah	Kantor Camat
21	Kompor Gas (Sawita)	-	-	✓	1 buah	Kantor Camat
22	Mesin Ketik Manual Longewagen (18)	-	-	✓	1 buah	Kantor Camat
23	Papan Pengumuman	✓	-	-	1 buah	Kantor Camat
24	Sepeda Motor (Suzuki / Smas)	✓	-	-	1 buah	Kantor Camat
25	Filling Besi/Metal	✓	-	-	1 buah	Kantor Camat
26	Meja Rapat	✓	-	-	3 buah	Kantor Camat
27	Kursi Lipat (Chitose)	-	-	-	15 buah	Kantor Camat
28	Wireles Amplifier /Toa	✓	-	-	1 buah	Kantor Camat
29	P.C Unit / Komputer PC (Intel)	-	-	✓	1 buah	Tidak Ada
30	Sepeda Motor (Yamaha Jufiter Z)	✓	-	-	1 unit	Kantor Camat
31	Perkakas Benkel (Yasuka/(Shimizu))	✓	-	-	3 buah	Kantor Camat
32	Alat Kantor lain-lain	-	-	✓	1 buah	K. Camat

33	Meja Bundar (Victor)	-	-	✓	1 buah	Kantor Camat
34	Kursi Rapat (Fukuda)	-	-	✓	12 buah	Kantor Camat
35	Handycam (Sony)	✓	-	-	1 buah	Camat
36	Sepeda Motor Susuki/Shogun125)	✓	-	-	3 buah	Kantor Camat
37	Kapal Patroli Pantai (Joloro)	✓	-	-	1 Buah	-
38	Filling Besi/Metal (Brother)	✓	-	-	1 buah	Kantor Camat
39	Lemari Pakaian (Olimpic)	✓	-	-	1 buah	Kantor Camat
40	Tandon Air (Exel)	✓	-	-	2 buah	Kantor Camat
41	Lap Top/Acer	✓	-	-	5 Unit	Kantor Camat
42	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	✓	-	-	5buah	Kantor Camat
43	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	✓	-	-	5 buah	Kantor Camat
44	Kursi Tamu di Ruang Pejabat Eselon III (Gaka)	✓	-	-	1 buah	Kantor Camat
45	Kursi Tamu di Ruang Pejabat Lain-lain	✓	-	-	1 buah	Kantor Camat
46	Lemari Buku untuk Pejabat Eselon III	✓	-	-	1 buah	Kantor Camat
47	Alat Komunikasi Radio UHF lain-Lain	✓	-	-	1 buah	Kantor Camat
48	Perkakas Bengkel Lain-lain	✓	-	-	1 buah	Kantor Camat
49	Kursi Rapat/Fallaz	✓	-	-	24 buah	Kantor Camat
50	P.C Unit/ Komputer PC (Samsung)	✓	-	-	1 buah	Kantor Camat
51	P.C Unit/ Komputer PC (Samsung)	✓	-	-	1 buah	Kantor Camat
52	Lap Top (Lenovo)	✓	-	-	1 buah	Kantor Camat

53	Meja Kerja Pejabat Eselon III	✓	-	-	1 buah	Kantor Camat
54	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	✓	-	-	2 buah	Kantor Camat
55	Sound System (marcopolo)	✓	-	-	1 buah	Kantor Camat
56	Kipas Angin (Flories)	✓	-	-	2 buah	Kantor Camat
57	Gambar Presiden/ Wakil Presiden	✓	-	-	1 buah	Kantor Camat
58	Printer (Hp/Laser Jet)	✓	-	-	2 buah	Kantor Camat
59	Tenda	✓	-	-	2 buah	Kantor Camat
60	Sound Sytem (Yamaha)	✓	-	-	1 buah	Kantor Camat
61	Kursi Plastik (Napoly)	✓	-	-	101 buah	Kantor Camat
62	AC Unit (LG)	✓	-	-	1 Unit	Kantor Camat
63	Kipas Angin (Maspion)	✓	-	-	10 buah	Kantor Camat
64	Televisi/LG	✓	-	-	1 buah	Kantor Camat
65	P.C Unit/ Komputer PC	✓	-	-	1 buah	Kantor Camat
66	Lap Top (Toshiba)	✓	-	-	1 buah	Kantor Camat
67	Printer (Pixma)	✓	-	-	2 buah	Kantor Camat
68	Kursi Rapat (Futura)	✓	-	-	6 buah	Kantor Camat
69	Alat pengukur Waktu Lain-lain (Nagoya)	✓	-	-	5 buah	Kantor Camat
70	Harddisk Eksternal (Toshiba)	✓	-	-	5 buah	Kantor Camat
71	Proyektor + Attachment (Benq)	✓	-	-	1 buah	Kantor Camat
72	Micropone/wireless Mic	✓	-	-	2 buah	Kantor Camat
73	Power Supply	✓	-	-	1 buah	Kantor

	Micropone					Camat
74	Lap Top (ASUS)	✓	-	-	3 buah	Kantor Camat
75	Meja Kerja (ACTIV/ ½ Biro)	✓	-	-	5 buah	Kantor Camat
76	Bangunan Gedung Kantor Permanen	✓	-	-	1 Unit	
77	Bangunan Gedung Instalasi Lain-Lain	✓	-	-	1 Unit	
78	Rumah Negara Gol. II Lain-lain	✓	-	-	1 Unit	
79	Tugu/Tanda Batas Administrasi Kec.	✓	-	-	1 Unit	
80	Bangunan Gedung Instalasi Lain-Lain	-	✓	-	1 Unit	
81	Tugu Pembangunan Lain-lain	-	✓	-	1 Unit	
82	Bagunan Gedung Kantor Permanen	✓	-	-	1 Unit	
83	Bangunan Gedung Tempat Petemuan Permanen	✓	-	-	1 Unit	
84	Bangunan Gedung Garasi Pool lain-lain	-	✓	-	1 Unit	

3. Keuangan

Kecamatan Bontosikuyu dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan berupa rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan dan fasilitasi di Kecamatan Bontosikuyu secara optimal. Dalam Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021-2026, kebijakan umum pengelolaan keuangan Satuan Kerja Kecamatan Bontosikuyu diarahkan pada pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan oleh Pemerintah.

Jumlah Anggaran Kecamatan Bontosikuyu pada Tahun 2022 Rp.1.877.818.136 ,- dan terealisir anggaran sebesar Rp. 1.816.227.555,- atau 97.98 % dengan rincian anggaran dan realisasinya sebagai berikut :

INDIKATOR DAN TOLAK UKUR KINERJA

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)
1.	Belanja Tidak Langsung	1.356.556.000	1.303.501.994	96,62
2.	Belanja Langsung	521.262.136	512.725.551	98,90
	a. Belanja Pegawai	87.600.000	87.600.000	100%
	b. Belanja barang dan Jasa	413.102.724	404.561.309	98,99 %
	c. Belanja Hibah	20.559.412	20.559.412	100
Jumlah 1 + 2		1.877.818.136	1.816.227.555	98,48

Berdasarkan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Kecamatan Bontosikuyu Tahun 2022 bahwa Jumlah Anggaran Awal adalah sebesar Rp.420.152.136 *(Empat ratus Dua Puluh Juta seratus lima pukluh dua Ribu seratus tiga puluh enam rupiah)* dan setelah mengalami Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) menjadi sebesar Rp. 521.262.136,- *(Lima dua puluh satu juta dua ratus enam puluh dua ribu seratus tiga puluh enam rupiah),* Indikator dan tolak ukur kinerja Kantor Kecamatan Bontosikuyu

berdasarkan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2022.

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

TAHUN 2022

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3	4
1.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA**	1. Perencanaan , Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.619.000
		2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.400.000
		3 Administrasi umum Perangkat daerah	79.000.000
		4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemeritahan Darah	278`898.136
		5 Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	70.490.000
2.	**PROGRAM PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	1. Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Tingkat kecamatan	10.000.000
		2 Penyelenggaraan Urusan nerintahan yang tidak ıksanakan oleh unit kerja angkat Daerah Yang ada di camatan	4.910.000

3.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DA KELURAHAN**	1.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Dan Keluahan	15.280.000
4.	**PROGRAM KOORDINAS KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	1.	Koordinasi paya penyelenggaran ketentraman dan ketertiban	11.965.000
5.	**PROGRAM PENYELENGGARAN URUSAN PEMERINTAHANN UMU**	1. 2. .	Penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum sesuai penugasan kepala Daerah	20.000.000
6.	**PROGRAM PEMBIMBINAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA**	1. .	Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembimbinan penagwasan Pemerintah Desa	15.800.000

BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategi merupakan jalan dari pelaksanaan program maupun kegiatan di suatu lembaga maupun instansi yang berpedoman kepada RPJMN dan RPJMD yang telah ditetapkan oleh Kepala Negara maupun Kepala Daerah sebagai suatu proses otonomi daerah dimana Rencana Strategis Kecamatan Bontosikuyu sejalan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Kepulauan selayar Tahun 2021-2026.

2.1.1 Tujuan

Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Untuk merealisasikan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar, perlu ditetapkan tujuan dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan yang akan dicapai dalam lima tahun kedepan dijabarkan sebagai berikut :

a. Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap kegiatan – kegiatan yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Kecamatan Bontosikuyu;
b. Meningkatkan efektifitas koordinasi, fasilitasi, penyelenggaraan layanan dan pembinaan dalam bidang Pemerintahan, Ekonomi Pembangunan, Kesejahteraan Sosial, Ketentraman dan Ketertiban Umum.

2.1.2 Sasaran

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Sasaran Kecamatan Bontosikuyu yang akan diwujudkan dalam kurun waktu sampai akhir tahun 2026, ditetapkan sebagai berikut :

1. Meningkatnya efektifitas koordinasi dalam pemberdayaan masyarakat, penerapan dan penegakan peraturan perundang – undangan, pemeliharaan sarana dan fasilitas umum, penyelenggaran kegiatan pemerintahan di Kecamatan Bontosikuyu.
2. Meningkatnya efektifitas pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
3. Meningkatnya efektifitas koordinasi, fasilitasi, penyelenggaraan layanan dan pembinaan pada urusan Pemerintahan bidang Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan pertanahan.
4. Meningkatnya efektifitas koordinasi, fasilitasi, penyelenggaraan layanan dan pembinaan pada urusan Pemerintahan bidang ekonomi dan pembangunan untuk urusan Pekerjaan Umum, Perumahan, Penataan Ruang, Perencanaan Pembangunan, Lingkungan Hidup, Pertanian, Koperasi dan UKM, Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, Kehutanan, Perdagangan.

5. Meningkatnya efektifitas koordinasi, fasilitasi, penyelenggaraan layanan dan pembinaan pada urusan Pemerintahan bidang kesejahteraan sosial untuk urusan Bidang Pendidikan, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Sosial, Ketenagakerjaan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga.
6. Meningkatnya efektifitas koordinasi, fasilitasi, penyelenggaraan layanan dan pembinaan pada urusan Pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban Umum untuk urusan Bidang Pemerintahan Umum, dan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.

2.1.3. Strategi

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar, diperlukan Strategi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Adapun strategi yang dilaksanakan dalam lima tahun kedepan dijabarkan sebagai berikut :

1. Peningkatan efektifitas koordinasi dalam pemberdayaan masyarakat, penerapan dan penegakan peraturan perundang – undangan, pemeliharaan sarana dan fasilitas umum, penyelenggaran kegiatan pemerintahan di Kecamatan Bontosikuyu.
2. Peningkatan efektifitas pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
3. Peningkatan efektifitas koordinasi, fasilitasi, penyelenggaraan layanan dan pembinaan pada urusan Pemerintahan bidang

Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan pertanahan.

4. Peningkatan efektifitas koordinasi, fasilitasi, penyelenggaraan layanan dan pembinaan pada urusan Pemerintahan bidang ekonomi dan pembangunan untuk urusan Pekerjaan Umum, Perumahan, Penataan Ruang, Perencanaan Pembangunan, Lingkungan Hidup, Pertanian, Koperasi dan UKM, Kelautan dan Perikanan, Kehutanan, Perdagangan.
5. Peningkatan efektifitas koordinasi, fasilitasi, penyelenggaraan layanan dan pembinaan pada urusan Pemerintahan bidang kesejahteraan sosial untuk urusan Bidang Pendidikan, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Sosial, Ketenagakerjaan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga.
6. Peningkatan efektifitas koordinasi, fasilitasi, penyelenggaraan layanan dan pembinaan pada urusan Pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban Umum untuk urusan Bidang Pemerintahan Umum, dan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.

2.2 Rencana Kinerja

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Stratejik, yang akan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan Agenda Penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi Instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Di dalam Rencana Kinerja ditetapkan rencana Capaian Kinerja

Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang Sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya Program, Kegiatan, serta Kelompok Indikator Kinerja dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Penetapan indikator Kinerja Kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yeng realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus diorganisasi. Format Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2022 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

2.2.1. Program

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Kecamatan Bontosikuyu, maka program-program yang telah dilaksanakan tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan pelayanan Publik
c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
d. Program Koordinasi dan Ketentraman dan ketertiban umum
e. Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum
f. Program Pembimbinan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

2.2.2 Kegiatan

Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Berpedoman pada tahun sebelumnya maka kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

1. **Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten Kota**
   - Perencanaa, penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat Daerah ;
   - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   - Administrasi Keuangan Perangkat daerah
   - Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah
   - Pemeliharaan Barang Milik daerah penunjang urusan Pemerintahan daerah
2. **Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**
   - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan
   - Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan
3. **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa / Keluarahan**
   - Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan
4. **Program Koordinasi Ketentraman dan ketertiban umum**
   - Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

5. Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum

- Penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum sesuai penugasan kepala Daerah

6. Program Pembimbinan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan penagawasan pemerintahan Desa.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Analisis Capaian Kinerja

Analisis Capaian kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi Kecamatan Bontosikuyu. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerjaguna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Pengukuran dimaksud merupakan hasil dan suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan (input) dan keluaran (output). Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang penilaian dalam proses penyusunan kebijakan program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Data kinerja lazimnya dapat diperoleh melalui dua sumber, yaitu: (1) data internal yang dimiliki Satuan Kerja Kecamatan

Bontosikuyu dan (2) data eksternal, berasal dari luar Satuan Kerja Kecamatan Bontosikuyu baik data primer maupun data sekunder.

Pengukuran kinerja Satuan Kerja Kecamatan Bontosikuyumencakup:

1. Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dan masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan;
2. Tingkat pencapaian sasaran Satuan Kerja Kecamatan Bontosikuyu yang merupakan pencapaian target dan masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan pada dokumen rencana kerja.

3.2 Evaluasi Kinerja

Secara umum Satuan Kerja Kecamatan Bontosikuyutelah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021 – 2026.

Realisasi pencapaian program dan kegiatan pada tahun 2022 pada Satuan Kerja Kecamatan Bontosikuyu memiliki pencapaian kinerja baik sebagai berikut :

A. Pendapatan

Dalam tahun anggaran 2022 Kantor Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar, tidak mengelolah pendapatan

B. Belanja Operasi

Belanja operasi Kantor Camat Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar, dianggarkan sebesar Rp.2=1.877.818,136,-dan terealisasi sebesar Rp.1.816.227,555- atau 97,48 .% dengan rincian belanja sebagai berikut :

a. Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp. 1.356.556.000.-dan terealisasi sebesar Rp. 1.303.501.994. atau 99,62 %

b. Belanja Barang Jasa dianggarkan sebesar Rp. 500.792.724.000 dan terealisasi sebesar Rp. 512.725.561 atau 98,90 %

c .Belanja Hibah

Belanja Hibah Kantor Camat Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar, Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 20.558.412,- dan terealisasi Rp. 20.558.412,- atau 100 % dari alokasi anggaran.

Dari kelompok Belanja Operasi tersebut diatas Kantor Camat Bontosikuyu.merealisasikan dalam berbagai program dan kegiatan sebagai berikut :

1) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA

Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kierja Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran Rp. 10.619.000,- dan terealisasi sebesar Rp.10.614.000 atau 99,95 % dari alokasi anggaran, adapun rincian kegiatan dari Program Program perencanaan , penganggaran dan evaluasi Kenerja Pernagkat Daerah Daerah sebagai berikut :

- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran Rp. 1.800.000,- dan terealisasi sebesar Rp.1.795.000 atau 99.98% dari alokasi anggaran
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA – SKPD dengan alokasi anggaran Rp. 750.000,- dan terealisasi sebesar Rp.750.000 atau 100% dari alokasi anggaran
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Petubahan RKA – SKPD dengan alokasi anggaran Rp. 1.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp.1.500.000atau 100% dari alokasi anggaran
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA – SKPD dengan alokasi anggaran Rp. 669.000,- dan terealisasi sebesar Rp.669.000 atau 100% dari alokasi anggaran
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Petubahan DPA – SKPD dengan alokasi anggaran Rp. 1.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.500.000 atau 100% dari alokasi anggaran

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinetja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan alokasi anggaran Rp. 4.400.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.40000.000 atau 100% dari alokasi anggaran

Program dan Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah bertujuan untuk pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah yang efektif dan efisien dengan alokasi anggaran Rp 4.400.000.- dan terealisasi sebesar Rp. 4.440.000.- atau 100 % dari alokasi anggaran dengan Sub Kegoatan

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dengan output terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan yang akurat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.400.000,00 dengan terealisasi sebesar Rp. 4.400.000,00 atau 100% dari alokasi anggaran.

Program dan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah bertujuan untuk peningkatan penyediaan peraturan perundang undangan dengan alokasi anggaran Rp. 79.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 77.672.000- atau 98.32 % dari Alokasi anggaran

1. Sub Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan dengan output terpenuhinya bahan bacaan dengan alokasi Anggaran Rp 7.700.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 6.380.000,-atau 82,86 % dari alokasi anggaran.
2. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan Output kegiatan terlaksana konsultasi dan kelancaran tugas tugas SKPD dengan alokasi anggaran Rp 71.300.000,- dan terealissai

sebesar Rp 71.292. 000,- atau 99,99% dari alokasi anggaran.

Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah bertujuan untuk terlaksananaya urusan pemerintahan di kecamatan bontosikuyu dengan alokasi anggaran Rp. 278.898.136,- dan terealisasi sebesar Rp.272.306.881- atau 97.64 % dari Alokasi anggaran

1. Kegiatan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik dengan output terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi air dan listrik dengan alokasi anggaran Rp 12.452.924,- dan terealisasi sebesar Rp 7.651.609,- atau 61.44 % dari alokasi anggaran.
2. Kegiatan penyediaan jasa pelayanan kantor dengan output terpenuhinya pelaksanaan administrasi perkantoran dengan alokasi anggaran Rp 266.445.212,- dan terealisasi sebesar Rp 264.655.612- atau 99,33 % dari alokasi anggaran.

Kegitana pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah bertujuan terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp 70.490.000,- dan terealisasi sebesar Rp 69.902.880,- atau 99,17 % dari alokasi anggaran.

- Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dengan output kegiatan tersedianya biaya pemeliharaan kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp 70.490.000,- dan terealisasi sebesar Rp 69.902.880 atau 99 % dari alokasi anggaran.

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMETINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK.

Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatandengan alokasi anggaran sebesar Rp 10,000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 9.985.000,- atau 99.99 % dari alokasi anggaran.

- Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan Output terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp 10.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 9.985.000,- atau 99,99 % dari alokasi anggaran.

- **Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat daerah** yang ada di Kecamatan alokasi anggaran sebesar Rp 4.910.000,- dan terealisasi sebesar Rp 4.910.000,- atau 100 % dari alokasi anggaran.

  - Sub Kegiatan Fasilitasi percepatan pencapaian Standar pelayanan Minimal di Wilayah kecamatan dengan Output terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp 4.910.000,- dan terealisasi sebesar Rp 4.910.000,- atau 99,99 % dari alokasi anggaran.

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dan kelurahan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 15.280.000,- dan terealisasi sebesar Rp . 15.280.000,- atau 100 % dari alokasi anggaran.

- Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forim Musyawarah perencanaan pembangunan di Desa

alokasi anggaran sebesar Rp 10.000.000,-dan terealisasi sebesar Rp 10.000.000,- atau 100 % dari alokasi anggaran.

- Sub Kegiatan Peningkatan Efektipitas Kegiatan pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan alokasi anggaran sebesar Rp 5.280.000,-dan terealisasi sebesar Rp 5.280.000,- atau 100 % dari alokasi anggaran.
-

3. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Kegiatan Koordinasi Upaya Peyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan alokasi anggaran sebesar Rp 11. 865.000,- dan terealisasi sebesar Rp 11.865.000,- atau 100 % dari alokasi anggaran.

- Sub Kegiatan sinergitas dengan Kepolisian negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan istansi Pertikal di Wilayah kecamatan dengan output kegiatan terlaksananya ketentraman dan ketertiban dan alokasi anggaran sebesar Rp 11.865.000,- dan terealisasi sebesar Rp 11.865.000,- atau 100 % dari alokasi anggaran.

4. PROGRAM PENYELENGGARAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemeintahan Umum Seuai dengan penugasan kepala Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp 20.000000,- dan terealisasi sebesar Rp 20.000.000,- atau 100 % dari alokasi anggaran.

- Sub Kegiatan Pembinaan wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapknan Pengamalan pancasila pelaksanaan UUD 1945 Pelestarian Bhinekan Tinggak Ika serta Pemertahanan dan

Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan RI dengan alokasi anggaran sebesar Rp 20.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 20.000.000,- atau 100 % dari alokasi anggaran.

-

-

5.PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERITAHAN DESA

Kegiatan Fasilitasi, rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan pengawasan pemrintahan Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp 15.800.000,- dan terealisasi sebesar Rp 15.790.000,- atau 99.99 % dari alokasi anggaran.

- Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan pemberdayaan Masyarakat Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp 10.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 9.950.000,- atau 98.99% dari alokasi anggaran.
- Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di wilayah Kecamatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 5.800.000,- dan terealisasi sebesar Rp 5.800.000,- atau 98.99% dari alokasi anggaran.

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN KOTA

Program ini dilaksanakan melalui 5 (Lima) Kegiatan dan 12 (Dua belas) Sub Kegiatan utama sebagai berikut :

Tabel.3.4.1. Daftar Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan kabupaten / Kota :

NO.	KEGIATAN / Sub Kegiatan	KET.
1.	Perencanaan, Penganngaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	99, 95%
	Administarsi Keuangan Perangkat Daerah	100 %
2	Adminustrasi Umum Perangkat daerah	98,32 %
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	97.64 %
4	Pemerintahan daerah	
5	Pemeliharaan Barang Milik daerah penunjang Urusan pemerinataan daerah	99.17 %

Adapun capaian keberhasilan dari pelaksanaan Prigam ini, dapat diuraikan, sebagai berikut :

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah				
IndikatorKinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Satuan
Input	Dana	1.800.0000	1.795.000	Rupiah
Output	Jumlah	5 Dokumen	5 Dokumen	bulan
Outcome	Terlaksananya Pelayanan Administrasi dengan baik	100	100	%

Dengan adanya kegiatan diatas, maka pelaksanaan Pendidikan dan Latihan dapat terlaksana dengan dengan Anggaran Rp. 1.800000,- dan Realisasi sebesar Rp. 1.795.000- atau 99.99 % dari alokasi anggaran.

2. Kegiatan Adminsitrasi Keuangan Perangkat daerah

kegiatan ini dilaksanakan melalui 1 (Satu) Sub kegiatan utama sebagai berikut :

abel.3.4.2. Daftar Kegiatan pada Program perencanaan,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

NO.	Sub KEGIATAN	KET.
1.	Koordinasi dan Penyusunan laporan RKA-SKPD	100 %

Adapun capaian keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan ini, dapat diuraikan, sebagai berikut :

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				
IndikatorKinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Satuan

Input	Dana	4.400.000	4.400.000	Rupiah
Output	Jumlah Dokumen RKA – SKPD	1 Dokumen	1Dokumen	bulan
Outcome	Terlaksananya Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	100	100	%

NO.	KEGIATAN	KET.
1.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	100 %

Adapun capaian keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan ini, dapat diuraikan, sebagai berikut :

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				
IndikatorKinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Satuan
Input	Dana	1.500,000	1.500.000	Rupiah
Output	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1Dokumen	bulan
Outcome	Terlaksananya Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	100	100	%

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtusar realisasi Kineja SKPD				
IndikatorKinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Satuan
Input	Dana	4.400.000	4.400.000	Rupiah
Output	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Bulan
Outcome	Tersedianya Penysunan Laporan Capaian Kineja SKPD	100	100	%

Dengan adanya kegiatan diatas, Penyusunan Laporan capaian Kinerja SKPD dan di ketahuan kemajuan dan keberhasilan SKPD dengan Anggaran Rp. 4.400.000,- dan Realisasi sebesar Rp. 4.400.000,- atau 100 % dari alokasi anggaran

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Program ini dilaksanakan melalui 2 (Dua) kegiatan utama sbb :

Tabel.3.4.2. Daftar Kegiatan pada Program administrasi keuangan perangkat daerah

NO.	KEGIATAN	KET.
1.	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	100%

Adapun capaian keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan ini, dapat diuraikan, sebagai berikut :

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD				
IndikatorKinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Satuan
Input	Dana	4.150.000	4.150.000	Rupiah
Output	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	1 Dokumen	1 Dokumen	Bulan
Outcome	Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulan/Semesteran SKPD	100	100	%

Dengan adanya kegiatan diatas, koordinasi penyusunan Laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan di ketahui kemajuan dan keberhasilan SKPD dengan Anggaran Rp. 4.150.000,- dan Realisasi sebesar Rp. 4.150.000,- atau 100 % dari alokasi anggaran.

3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Program ini dilaksanakan melalui 2 (Dua) kegiatan utama sbb :

Tabel.3.4.2. Daftar Kegiatan pada Program administrasi umum Perangkat Daerah

NO.	KEGIATAN	KET.
1.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	80,25 %

Adapun capaian keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan ini, dapat diuraikan, sebagai berikut :

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan				
Indikator Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Satuan
Input	Dana	7`700`000	6.382.000	Rupiah
Output	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	1Paket	paket	Tahun
Outcome	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang tepat waktu	100	98,32	%

Dari tabel diatas menunjukkan kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan di ketahui kemajuan dan keberhasilan SKPD dengan Anggaran sebesar Rp 7.700.000 dan terealisasi sebesar Rp 6.382.000 atau 98,32 %.

Tabel.3.4.2. Daftar Kegiatan pada Program administrasi umum Perangkat Daerah

NO.	KEGIATAN	KET.
1.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	99,99 %

Adapun capaian keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan ini, dapat diuraikan, sebagai berikut :

Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
Indikator Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Satuan
Input	Dana	71.300.000	71.292.000	Rupiah
Output	Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah yang diikuti	1 Kegiatan	1Kegiatan	12 Bulan
Outcome	Terlaksananya kegiatan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	100	99.99	%

Dari tabel diatas menunjukkan kegiatan Penyediaan rapat koordinasi dan konsultasi di ketahui kemajuan dan keberhasilan

SKPD dengan Anggaran sebesar Rp 71.300.000,- dan terealisasi sebesar Rp 91.292.000,- atau 99.99 % dari alokasi anggaran.

4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program ini dilaksanakan melalui (Satu) Sub kegiatan utama sbb :

Tabel.3.4.2. Daftar Kegiatan pada Program penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah

NO.	KEGIATAN	KET.
1.	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	61.44%

Adapun capaian keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan ini, dapat diuraikan, sebagai berikut :

Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik				
Indikator Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Satuan
Input	Dana	12.452.924	7.651.069	Rupiah
Output	Jumlah jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang tersedia	12 bulan	12 bulan	Tahun
Outcome	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran dengan baik	100	61.44	%

Dari tabel diatas menunjukkan kegiatan Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik di ketahui kemajuan dan keberhasilan SKPD dengan Anggaran sebesar Rp .12.452.924.- dan terealisasi sebesar Rp. 7651.069 atau 61.44 % dari alokasi anggaran.

Tabel.3.4.2. Daftar Kegiatan pada Program penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah

NO.	KEGIATAN	KET.
1.	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	99,33%

Adapun capaian keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan ini, dapat diuraikan, sebagai berikut :

Penyediaan jasa pelayanan umum kantor				
Indikator Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Satuan
Input	Dana	266.445.212	264.655.612	Rupiah
Output	Terwujudnya pelayanan adminstrasi perkantoran	12 bulan	12 bulan	Tahun
Outcome	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	99,92	99,33	%

Dari tabel diatas menunjukkan kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor di ketahui kemajuan dan keberhasilan SKPD dengan Anggaran sebesar Rp 266.455.212,- dan terealisasi sebesar Rp 264.655.612 atau 99,33 % dari alokasi anggaran.

5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Program ini dilaksanakan melalui 1 (Satu) kegiatan utama sbb :

Tabel.3.4.2. Daftar Kegiatan pada Program pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.

NO.	KEGIATAN	KET.
1.	Penyediaan jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	99,17%

Adapun capaian keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan ini, dapat diuraikan, sebagai berikut :

Penyediaan jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan				
Indikator Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Satuan
Input	Dana	70.490.000	69.902.880	Rupiah
Output	Tersedianya kendaraan dinas operasional yang memadai	8 unit	8 unit	Tahun
Outcome	Terlaksananya peningkatan kualitas tugas tugas pemerintahan	100	99,17	%

Dari tabel diatas menunjukkan kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan di ketahui kemajuan dan keberhasilan SKPD dengan Anggaran sebesar Rp,70.490.000,- dan terealisasi sebesar Rp 69902.880 atau 99,17% dari alokasi anggaran.

2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Program ini dilaksanakan melalui 2 (Satu) kegiatan Dan satu Sub Kegiatan utama sbb :

Tabel.3.4.2. Daftar Kegiatan pada Program koordinasi kegiatan pemberdayaan desa.

NO.	KEGIATAN	KET.
1.	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 %

Adapun capaian keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan ini, dapat diuraikan, sebagai berikut

Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan				
Indikator Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Satuan
Input	Dana	10.000.000	10.000.000	Rupiah
Output	Terbinanya karakter dan akhlak masyarakat	1	1	Kegiatan
Outcome	Terwujudnya pemahaman terhadap nilai nilai keagamaan bagi masyarakat	100	100	%

Dari tabel diatas menunjukkan kegiatan Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan di ketahui kemajuan dan keberhasilan SKPD dengan Anggaran sebesar Rp 10.000.000 dan terealisasi sebesar Rp 10.000.000 atau 100 % dari alokasi anggaran.

2 Kegiatan Penyelenggaraan Umum Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

Program ini dilaksanakan melalui 1 (Satu) Sub kegiatan utama sbb :

Tabel.3.4.2. Daftar Kegiatan pada Program koordinasi upaya Penyelenggraan umum pemerintahan yang tidak dilaksanakan di Tingkat kecamatan .

NO.	KEGIATAN	KET.
1.	Fasiliatsi Percepatan Standar pelayanan Minimal di wilayah Kecamatan	100 %

Adapun capaian keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan ini, dapat diuraikan, sebagai berikut :

Fasiliatsi Percepatan Standar pelayanan Minimal di wilayah Kecamatan				
Indikator Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Satuan
Input	Dana	4.910.000	4.910000	Rupiah
Output	Terlaksananya pelayanan Publik	1	1	Dokumen
Outcome	Tercapainya target Penyusunan SOP kecamatan bontosikuyu	100	100	%

Dari tabel diatas menunjukkan kegiatan sinergitas dengan kepolisian Negara republic Indonesia,tentara nasional Indonesia dan instansi vertical di wilayah kecamatan di ketahui kemajuan dan keberhasilan SKPD dengan Anggaran sebesar Rp 4.910.000,- dan terealisasi sebesar Rp 4.910.000,- atau 100 % dari alokasi anggaran.

3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN.

Program ini dilaksanakan melalui 1 (Satu) kegiatan Dan Sub Kegitan utama sbb :

1, Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah perencanaan pembangunan di Desa

Tabel.3.4.2. Daftar Kegiatan pada Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah.

NO.	KEGIATAN	KET.
1.	Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forim Musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	100 %

Adapun capaian keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan ini, dapat diuraikan, sebagai berikut :

Peningkatan Partisipatif Masyarakat dalam Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa				
Indikator Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Satuan
Input	Dana	10.000.000	10.000.000	Rupiah
Output	Terlaksananya Musyawarah perencanaan desa	1	1	Kegiatan
Outcome	Terwujudnya perencanaan desa dan Kecamatan Yang baik	100	100	%

Dari tabel diatas menunjukkan kegiatan Perencanaan Pembangunan dapoat terlaksana setiap tahun dengan Anggaran sebesar Rp 10.000.000 dan terealisasi sebesar Rp 10.000.000atau 100 % dari alokasi anggaran.

2, Sub Kegiatan peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan.

Program ini dilaksanakan melalui 1 (Satu) kegiatan utama sbb :

Tabel.3.4.2. Daftar Kegiatan pada Program penyelenggaraan fasilitasi,rekomendasi dan koordinasi dan pengawasan pemerintahan desa.

NO.	SUB KEGIATAN	KET.
1.	Peningkatan Efektipitas Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	100 %

Adapun capaian keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan ini, dapat diuraikan, sebagai berikut :

Peningkatan Efektipitas Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan				
Indikator Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Satuan
Input	Dana	5.000.000,-	5.000.0000	Rupiah
Output	Terlaksananya kegiatan Asistensi APB Desa	1	1	Paket
Outcome	Terwujudnya Pelaksanaan APB Desa	100	100	%

Dari tabel diatas menunjukkan kegiatan Fasilitasi pelaksanaan APB Desa dapat terlaksana sesuai Perencanaan dengan Anggaran sebesar Rp. 5.000.000 dan terealisasi sebesar Rp 5.000.000, atau 100 % dari alokasi anggaran.

4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Program ini dilaksanakan melalui 1 (Satu) kegiatan utama sbb :

Tabel.3.4.2. Daftar Kegiatan pada Program penataan organisasi.

NO.	KEGIATAN	KET.
1.	Pembinaan wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapknan Pengamalan pancasila pelaksanaan UUD 1945 Pelestarian Bhineka Tinggak Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan RI dengan	100 %

Adapun capaian keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan ini, dapat diuraikan, sebagai berikut :

Terlaksanannya Pembinaan wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan pancasila pelaksanaan UUD 1945 Pelestarian Bhineka Tinggak Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan RI dengan				
Indikator Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Satuan
Input	Dana	11.865.000.	11.865.000	Rupiah
Output	Terlaksananya kegiatan Penaggulangan COVID 19	1	1	Tahun
Outcome	Terwujudnya Pelaksanan Vaksinasi bagi Masyarakat	100	100	%

Dari tabel diatas menunjukkan kegiatan Monitoring,Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana di ketahui kemajuan dan keberhasilan SKPD dengan Anggaran sebesar Rp

11.865.000 dan terealisasi sebesar Rp 11.865.000,- atau 100 % dari alokasi ang

5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Program ini dilaksanakan melalui 1 KEGIATAN) kegiatan DAN Satu Sub Kegiatan utama sebagai berikut:

Kegiatan Penyelenggaraan urusan pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Tabel.3.4.5. Daftar Kegiatan pada Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

NO.	Sub KEGIATAN	KET.
	Pembinaan wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapknan Pengamalan pancasila pelaksanaan UUD 1945 Pelestarian Bhinekan Tinggak Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negaa Kesatuan RI.	100%

Adapun capaian keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan ini, dapat diuraikan, sebagai berikut :

Terlaksananya Peringatan HUT RI Dan hari Jadi Selayar				
Indikator Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Satuan
Input	Dana	20.000.000	2.0000.000	Rupiah
Output	Terwujudnya Perinagatan Hari Besar Nasional	2	2	Kegiatan
Outcome	Terlaksananya Peringatan HUT RI dan hari jadi Sealayar	100	100	%

6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Program ini dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan DAN Dua Sub Kegiatan utama sebagai berikut :

Kegiata Fasilitasi , Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan Pengawasan Pemerintahan Desa

Tabel.3.4.11. Daftar Kegiatan pada Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

NO.	SUB KEGIATAN	KET.
1.	Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan pemberdayaan Masyarakat Desa	100 %

Adapun capaian keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan di atas, dapat diuraikan, sebagai berikut:

Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa				
Indikator Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Satuan
Input	Dana	10.000.000	10.000.000	Rupiah
Output	Terselenggaranya Pemberdayaan desa	1	1	Laporan
Outcome	Tersedianya Pemberdayaan Masyarakat	1	1	Paket

Dengan adanya kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka masyarakat di Kecamatan Bontosikuyu dapat memperoleh Bantuan.

Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan				
Indikator Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Satuan
Input	Dana	5.800.000	15.800.000	Rupiah
Output	Tersedianya Laporan APB Dea	12	12	Desa
Outcome	Tersedianya Dokumen APB Desa	12	12	Dokumen

BAB IV
P E N U T U P

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai media akuntabilitas pertanggungjawaban dan pengukuran kinerja pada satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar sekaligus sebagai umpan balik bagi pengambil keputusan serta bagi pihak-pihak yang terkait, serta sebagai media pembelajaran yang bersifat terus menerus untuk peningkatan kinerja melalui pengukuran sasaran dan indikator-indikatornya yang dikaji secara realistis.

Laporan Akuntabilitas ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi *stakeholders* (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar. Ruang lingkup penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Kecamatan Bontosikuyu ini bersifat makro dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi secara keseluruhan.

Belum secara sempurna dapat menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, sangat disadari dalam penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 ini, namun setidaknya diharapkan masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang pelaksanaan kewajiban yang telah dilakukan Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar.

Langkah-langkah penyempurnaan laporan kinerja ini senantiasa merupakan prioritas, agar terwujud akuntabilitas yang ingin diwujudkan bersama, untuk itu diperlukan peran aktif masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan.

Dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini, dapat diperoleh gambaran tentang penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah khususnya pada Kantor Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar.

Kedepannya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini bukan hanya dalam rangka memenuhi kewajiban akuntabilitas, namun dapat memenuhi fungsinya sebagai sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Pemerintah, khususnya pada Kantor Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar.

Pariangan, 3 Januari 2023

CAMAT BONTOSIKUYU,

Drs. MUHAMMAD ARIS
Pangkat :Pembina. Tk.I. IV/b
NIP. 19671029 199512 1 002

B. RENCANA KERJA

1. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 2021 KECAMATANBONTOSIKUYU

Kecamatan Bontosikuyu yang merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menetapkan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2021 juga mengacu kepada Indikator Kinerja Utama yang merupakan acuan kinerja SKPD, dalam hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

RENCANA KINERJA TAHUN 2022 NAMA SKPD : KECAMATAN BONTOSIKUYU

SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN				KET
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Meningkatnya efektifitas koordinasi dalam Pembuatan dokumen keuanagn , pelaporan dan laporan capaian kinerja SKPD	Terlaksananya penyusunan Dokumen keuangan dan pelaporan capaian Kinerja SKPD	3 Dokumen	Peencanaan penganggaran dan Evaluasi Kinerja SKPD					
				Pemyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen yang Terealisasi.	Dokumen	1	
				Pemyusunan DokumenPerunahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen yang Terealisasi.	Dokumen	1	
				Pemyusunan Dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen yang Terealisasi.	Dokumen	1	
				Penyusnan Laporan Capaian Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen yang Terealisasi.	Dokumen	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Cakupan Sarana Pelayanan dalam penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Kecamatan.		1.Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2,Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah 3 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tercapainyan pendidkan dan Pelatuhan bagi Pegawai	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan baik.	Paket	1	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tersedia	Bulan	12	
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang tersedia.	Bulan	12	
				Rapar – Rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Rapar – Rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah yang diikuti.	Bulan	12	
2. Meningkatnya Efektivitas pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang dibina dalam penyelenggaraan pemerintahan		Koordinasi pemberdayaan Masyarakat Desa	Peningkatan Efektifitas Kegiatan pemberdayaan Masyarakat Desa	Hasil Monitoring setiap Desa	Desa	12	
				Monitoring Kegiatan Pembangunan Desa/Kelurahan	Masyarakat yang berperilaku hidup bersih dan sehat	Desa	12	

1	2	3	4		6	7	8	9
3. Peningkatan efektifitas koordinasi, fasilitasi, penyelenggaraan layanan dan pembinaan pada urusan Pemerintahan bidang , pembangunan, Pemerintahan dan Kemasyarakatan	Jumlah satuan barang milik daerah yang terpakai		Penyediaan jasa Pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Terlaksananyan pemeliharaan barang milik pemerintah daerah	Jumlah Kendaraan / Laporan hasil Pemeliharaan	Unit	8	
	Fasilitasi pelayanan dan pelaksanaan pengawasan Covid 19		Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan kepolisian Negara RI TNI dan Instansi Vertikal	Terlaksananyan Vaksinasi Civid 19 dan capaian target yang di capai	Desa	12	
			Penyelenggaraan Urysan pemerintahan umum sesuai Penugasan kepala Daerah	Pembinaan Wawasan kebangsaan Ketahanan Nasional , Pengamalan Pancasila, UUD 1845	Terlaksananya Peringantan HUT RI dan hari Jadi Selayar	Paket	1	
	Peningkatan Kwalitas pelayanan Publik		Penataan Organisasi	Monitoring Evaluasi dan pengendalian pelayanan Publik dan tata laksanan	Terlaksananya Pembinan pelayanan dan Monitoring	Desa	12	

2. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN BONTOSIKUYU

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN BONTOSIKUYU
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN 2022
1	2	3
1.	Persentase Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	100 %
2.	Persentase Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen
3.	Persentase Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen
4.	Persentase Koordinasi Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen
5.	Koordinasi Penyusunan Laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	3 Dokumen
6.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	100%
7	Persentase Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (%)	100 %
8	Persentase Penyediaan jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Kistrik (%)	100 %
9.	Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor (%)	100 %
10.	Persentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan (%)	100 %
11.	Persentase Peningkatan Epektifitas Kegiatan pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Bontosikuyu	12 Desa
12.	Persentase Sinergitas Dengan Kepolisian RI, TNI, dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Bontosikuyu (%)	100 %
13.	Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan	100 %

	Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila Pelaksanaan UUD Negara Ri tahun 1945 Dan Bhineka Tunggak Ika (%)	
14.	Persentase Monitoring Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata laksana	1 Kegiatan
15.	Kegiatan pembinaan Koperasi Desa	1 Kegiatan
16.	Persentase peningkatan pengetahuan aparatur dan pelayanan yang berorientasi kepala pelayanan prima terhadap masyarakat (%)	100 %

CAMAT BONTOSIKUYU,

Drs. MUHAMMAD ARIS
Pangkat :Pembina, Tk.I IV/b
NIP. 19671029 199512002

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

NAMA SKPD : KANTOR KECAMATAN BONTOSIKUYU

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya efektifitas koordinasi dalam pemberdayaan masyarakat, penerapan dan penegakan peraturan perundang – undangan, pemeliharaan sarana dan fasilitas umum, penyelenggaran kegiatan pemerintahan di Kecamatan Bontosikuyu.	Cakupan sarana dan prasarana aparatur yang dipelihara secara rutin / berkala	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional 100%	Kasubag. Program Dam Keuangan	
		Nilai / Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan	Nilai/Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja x 100%	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	
2.	Meningkatnya Efektivitas pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang dibina dalam penyelenggaraan pemerintahan	Jumlah Desa yang dibina x 100 %	Kasi Tata Pemerintahan	
3.	Peningkatan efektifitas koordinasi, fasilitasi, penyelenggaraan layanan dan pembinaan pada urusan Pemerintahan bidang Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan pertanahan.	Jumlah satuan informasi kependudukan yang dihasilkan. Dan Penyusunan Dokumen Profil Kecamatan	Jumlah satuan informasi kependudukan x 100 % Jumlah Dokumen Profil X 100 %	Kasi Tata Pemerintahan	
		Fasilitasi pelayanan dan pelaksanaan APBD Desa yang dievaluasi, monitoring dan dikonsultasikan	Fasilitasi Desa yang dibina APBD x 100 % Target PBB Kec. Bontosikuyu di setiap Desa x 100 %	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kasi Tata Pemerintahan	

1	2	3	4	5	6
		Jumlah kegiatan PKK skala Kecamatan yang dikoordinasikan dan difasilitasi.	Jumlah kegiatan PKK Kecamatan yang difasilitasi x 100%	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
4.	Meningkatnya efektifitas koordinasi, fasilitasi, penyelenggaraan layanan dan pembinaan pada urusan Pemerintahan bidang ekonomi dan pembangunan untuk urusan Pekerjaan Umum, Perumahan, Penataan Ruang, Perencanaan Pembangunan, Lingkungan Hidup, Pertanian, Koperasi dan UKM, Kelautan dan Perikanan, Kehutanan, Perdagangan.	Fasilitasi perencanaan pembangunan Kecamatan / Desa berdasarkan pedoman dan standar yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten	Jumlah perencanaan pembangunan Desa yang difasilitasi x 100%	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		Fasilitasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan skala Kecamatan	Jumlah Desa yang dimonitoring dan dievaluasi pembangunannya x 100%	Kasi Ekonomi Pembangunan	
		Cakupan pengendalian dan pengawasan pelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Lingkungan Hidup yang diawasi, dilestarikan dan dikendalikan x 100 %	Kasi Trantib	

5.	Meningkatnya efektifitas koordinasi, fasilitasi, penyelenggaraan layanan dan pembinaan pada urusan Pemerintahan bidang kesejahteraan sosial untuk urusan Bidang Pendidikan, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Generasi Muda , dan Keluarga Sejahtera, Sosial, Ketenagakerjaan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	Jumlah Desa Yang melaksanaka kegiatan STQ/MTQ	Jumlah Peserta dan Jumlah Kegiatan Lomba yang dilaksanakan dan dilaporkan x 100 %	Kasi Kesos	
		Jumlah pemberdayaan keluarga setiap Desa diwilayah Kecamatan yang dibina dan difasilitasi dan dilaksanakan.	Jumlah keluarga disetiap Desa yang diberdayakan x 100%	Kasi Kesos	
		Jumlah nilai – nilai budaya lokal, sejarah lokal, lembaga keagamaan yang difasilitasi perlindungan, pengembangan dan pemanfaatannya.	Jumlah nilai – nilai budaya lokal, sejarah lokal, lembaga keagamaan yang difasilitasix 100%	Kasi Kesos	
6.	Meningkatnya efektifitas koordinasi, fasilitasi, penyelenggaraan layanan dan pembinaan pada urusan Pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban Umum untuk urusan Bidang	Cakupan Pelaksanaan Vaksinasi COVID 19 Yang di laporkan, dan Julah Sasaran yang akan di Vaksinasi.	Jumlah Masyarakat yang sudah mendapat Suntikan Vaksinasi Covid 19 x 100 %	Kasi Trantib	

	Pemerintahan Umum, dan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.	Cakupan pencegahan bencana dan kebakaran skala kecamatan yang dikoordinasikan dan difasilitasi penanganannya.	Jumlah bencana dan kebakaran skala kecamatan yang difasilitasi dan ditangani x 100 %	Kasi Trantib	
		Cakupan pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya ditingkat Kecamatan yang dikoordinasikan dan difasilitasi penanganannya.	Jumlah pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya ditingkat Kecamatan yang dikoordinasikan dan difasilitasi x 100 %	Kasi Trantib	

CAMAT BONTOSIKUYU,

Drs. MUHAMMAD ARIS
Pangkat :Pembina,Tk,I, IV/b
NIP. 19671029 199512 1 002

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA OUTCOME
KECAMATAN BONTOSIKUYU

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	RUMUSAN	TARGET	REALISASI	PENJELASAN
1	2	3	4	5	6	7
1. Meningkatnya efektifitas koordinasi dalam pemberdayaan masyarakat, penerapan dan penegakan peraturan perundang – undangan, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan Bontosikuyu.	Persentase ketersediaan Dokumen Keuangan pelaporan Capaian kinerja dan keuangan yang ditingkatkan.	PROGRAM PERENCANAAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	1. Penyusunan Dokumwen RKA SKPD 2. Penyusunan Dokuemn DPA/Kecamatan 3. Penyusunan Laporan Capaian kinerja SKPD 4 Penyusunan Perubahan Dokumen DPA DKPD	1 Dokumen 3 Dokumen 1Dokumen 1Dokumen	1 Dokumen 3 Dokumen 1Dokumen 1Dokumen	Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/135/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Adanya barang yang dikelola oleh Kecamatan;
	Persentase SDM Aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya.	PROGRAM ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	1. Bimbingan Teknis Peningkatan SDM Aparatur	1 Paket	1 Paket	

			3.			
1. Meningkatnya efektivitas koordinasi, fasilitasi, penyelenggaraan layanan dan pembinaan pada urusan Pemerintahan bidang Kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pertanahan	Jumlah Laporan Keuangan	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1. Penyusunan laporan keuangan	100%	100%	Kemudahan dalam membuat laporan Realisasi Fisk dan Keuangan
	Jumlah Dokumen Peraturan perundang undangan yang difasilitasi dan hasil konsultasi dalam dan luar daerah	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1. Penyediaan bahan Bacaan 2. Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD .	100 % 100 %	100 % 100 %	Adanya dukungan untuk mempermudah laporan dan hasil yang di capai setiap desa
	Persentase pengembangan pengelolaan keuangan daerah yang dikembangkan	PROGRAM PENYEDIAAN JASA PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH	1.Penyediaan jasa Komunikasi,air,listrik 2.Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor	1 Kegiatan 1 Kegiatan	1 Kegiatan 1 Kegiatan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Ter;aksananyan Adminjstrasi Perkantoran

CAMAT BONTOSIKUYU,

Drs. MUHAMMAD ARIS
Pangkat :Pembina, Tk.I. IVb
NIP. 19671029 199512 1 002

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
KECAMATAN BONTOSIKUYU

Alamat : JalanPendidikan No. 38 Telp.Pariangan Kode Pos 92855

KEPUTUSAN CAMAT BONTOSIKUYU
NOMOR : 67 TAHUN 2022

T E N T A N G

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH
(LAKIP)

CAMAT BONTOSIKUYU,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai Visi, Misi dan Tujuan Instansi Pemerintah, serta dalam rangka perwujudan tata pemerintahan yang baik (good governance), perlu disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);

b. bahwa dengan telah dilaksanakannya program kerja dan anggaran Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019, sebagai penjabaran hasil program kerja setiap satuan kerja diwajibkan menyampaiakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);

Mengingat :

1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah
4. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten kepulauan

KEDUA : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten kepulauan Selayar Tahun 2022 merupakan hasil kerja dari pelaksanaan program kerja dan anggaran satuan kerja

KETIGA : Sistematika Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten kepulauan Selayar Tahun 2022 disusun sebagai berikut :

Ikhtisar Eksekutif

BAB I : Pendahuluan

BAB II : Perencanaan Strategis

BAB III : Akuntabilitas Kinerja

KEEMPAT : Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten kepulauan Selayar Tahun 2022 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat keputusan ini dan merupakan

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan

Ditetapkan di : Pariangan
Pada Tanggal : 30 Desember 2022

CAMAT BONTOSIKUYU,

Drs. MUHAMMAD ARIS
Pangkat : Pembina Tk.I.IV/b
NIP.19671029 199512 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Bupati Kepulauan Selayardi Benteng
2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kepulauan selayar di Benteng
3. Tim Penyusun LAKIP yang dimaksud

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT BONTOSIKUYU

NOMOR : 46 Tahun 2022
TANGGAL : 30 Desember 2022

SUSUNAN TIM PENYUSUN
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)
KECAMATAN BONTOSIKUYU

A. Penanggung Jawab : Camat

B. Koordinator : Sekertaris Camat

C. Ketua : Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

D. Sekretaris : Kasubag Program Dan Keuangan

E. Anggota : DARMAWATI
ANDI ARMIN
IKAWIRASTI
MUHAMMAD IKHSAN
ADIYARI

Pariangan, Januari 2022

CAMAT BONTOSIKUYU,

Drs. MUHAMMAD ARIS
Pangkat : Pembina, T.I IV/b
NIP.19671029 199512 1 002

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN
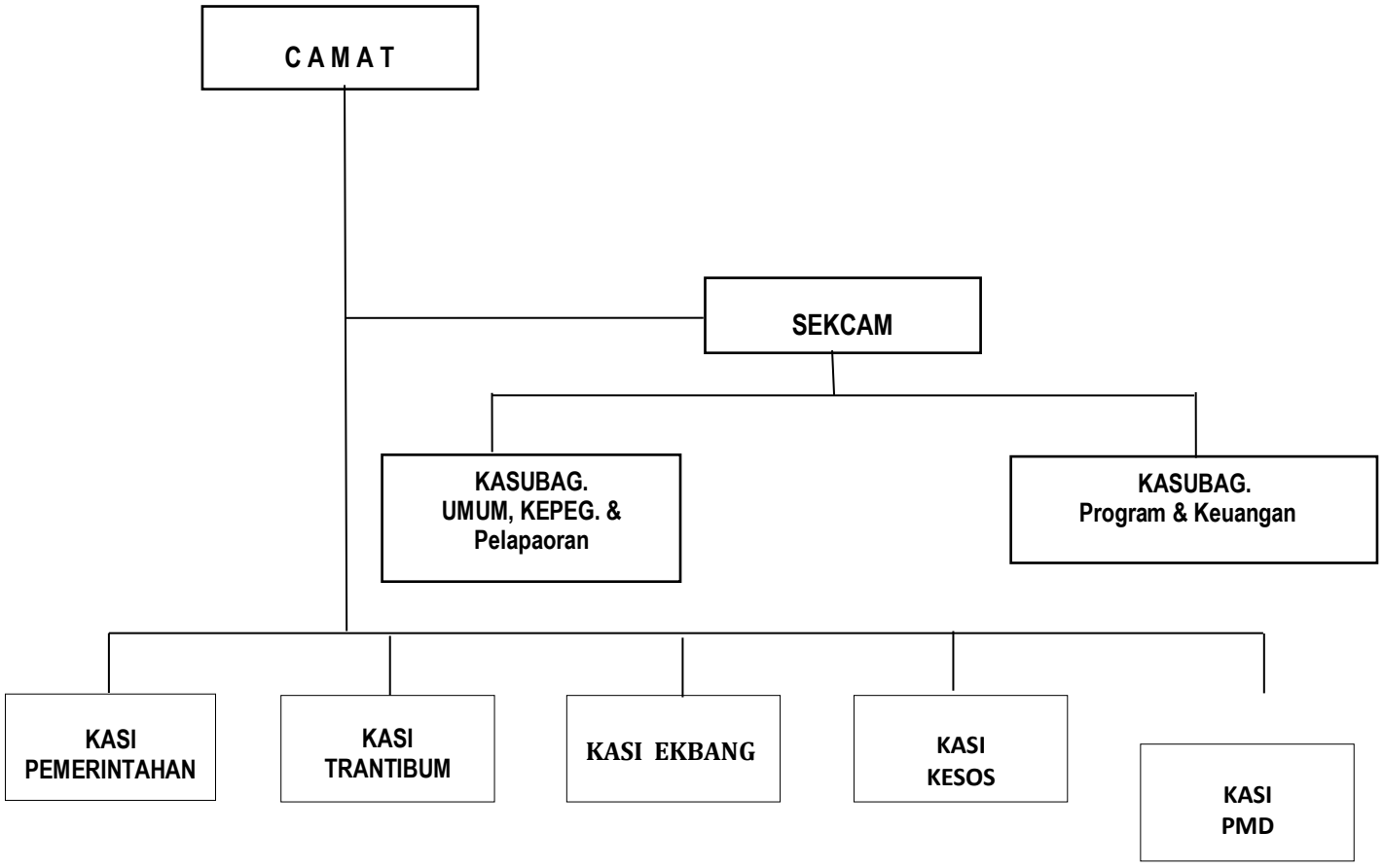
Perbup. No. 80 Tahun 2006